

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan kebijakan daerah adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di tingkat daerah. Salah satu upaya terpenting dalam kesejahteraan adalah peningkatan perekonomian di daerah. Kinerja pemerintah merupakan sarana terpenting dalam kebijakannya untuk meningkatkan perekonomian sesuai perekonomian masyarakat dengan menyeimbangkan kebijakan ekonomi daerah dari berbagai sektor yang termuat dalam peraturan dan kinerja birokrasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, membawa implikasi terbukanya peluang pembangunan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah serta pengembangan perekonomian daerah kabupaten, khususnya Kabupaten Bantul.

Ketentuan undang-undang tersebut diatas, sebagai dasar pemerintah daerah dan birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam bidang peningkatan ekonomi, maka yang harus diperhatikan adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan perekonomian khusus daerah sebagai landasan untuk meningkatkan perekonomian di sebuah daerah Kabupaten.

Pelaksanaan kinerja birokrasi pemerintah terhadap peningkatan perekonomian pada praktiknya di kalangan masyarakat masih terdapat keluhan berbagai pelayanan pemerintah (birokrasi), khususnya terhadap peningkatan dan kebijakan dalam perekonomian. Hal-hal yang menunjukkan bahwa adanya kelemahan birokrasi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah, khususnya Kabupaten Bantul adalah:

- 1) Kebijakan pemerintah beserta birokrasi yang tidak maksimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,
- 2) Kebijakan perekonomian hanya melibatkan kalangan masyarakat menengah keatas,
- 3) Pembelanjaan Keuangan Daerah yang tidak sesuai dengan APBDaerah,
- 4) Kebijakan ekonomi tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah beserta birokrasi pemerintahan daerah di bidang peningkatan dan pengelolaan perekonomian daerah Kabupaten Bantul selama ini yang menjadi beban masyarakat dan birokrat cenderung melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meski pada pelaksanaan birokrasi pemerintah Kabupaten Bantul tercatat lebih sedikit dibanding daerah lain yang ada di Indonesia. Sementara itu peran aparatur dan pemerintah daerah di bidang peningkatan ekonomi sejak beberapa dekade yang lalu lebih disiarkan sebagai penyandang dua peran yaitu sebagai Abdi Negara dan sebagai Abdi masyarakat dan peran sebagai abdi negara menjadi sangat dominan ketimbang peran sebagai abdi masyarakat.

Siklus pelayanan dan program dalam peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat lebih berakses ke kekuasaan birokrasi ketimbang melayani masyarakat, akibatnya birokrasi pemerintah daerah melayani dirinya sendiri dan meminta layanan dari masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, bahwa tugas birokrasi pemerintah daerah dalam peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Bantul harus lebih diutamakan terutama yang berkaitan dengan mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat di bidang pengembangan ekonomi kerakyatan, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan publik.¹

Pada praktiknya bahwa pelayanan aparat birokrat terhadap masyarakat/ dunia usaha masih menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya 4.396 jenis pungutan yang dilakukan aparatur mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dari jumlah pungutan tersebut, sekitar 27% dari total biaya produksi dialokasikan untuk memperoleh pelayanan aparatur di sebuah daerah. Hal ini menunjukkan birokrat menjadi penghambat bagi tumbuhnya sumber daya manusia khususnya dalam upaya peningkatan perekonomian.

Terkait dengan peranan birokrasi pemerintah terhadap peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Bantul, ada empat faktor besar yang menghambat efisiensi administrasi negara (birokrasi), dalam peningkatan perekonomian daerah yaitu:

¹ Mohammad, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm 4.

- 1) Kecenderungan membengkaknya birokrasi baik dalam arti struktur maupun luasnya campur tangan terhadap kehidupan masyarakat dalam perekonomian,
- 2) Lemahnya kemampuan manajemen pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kelangsungan perekonomian daerah,
- 3) Rendahnya produktivitas perekonomian daerah dari berbagai bidang,
- 4). Kurangnya sumber daya manusia terhadap program pengembangan perekonomian di daerah.

Hambatan tersebut, di dalam pelaksanaan peningkatan perekonomian daerah adalah disebabkan oleh masuknya investor asing serta kebijakan ekonomi asing yang ikut campur dalam kebijakan ekonomi di daerah. Pemerintah beserta birokrasi tidak mampu membendung laju kebijakan moneter serta kerja sama terhadap asing dalam ekonomi yang tanpa disadari bahwa hal tersebut merupakan sistem monopoli dalam ekonomi. Jika hal ini terjadi, maka tujuan daerah untuk meningkatkan perekonomian akan sangat sulit tercapai.²

Kelemahan serta hambatan yang terjadi, baik dalam masyarakat maupun birokrasi pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah adalah merupakan salah satu program yang harus di utamakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dan birokrasi dalam sebuah sistem.

² *Ibid.*

Dengan melihat fakta terhadap kinerja birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan perekonomian daerah, sebagai wujud dari program pemerintah beserta birokrasi, maka hal tersebut akan menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 DI KABUPATEN BANTUL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja birokrasi pemerintah daerah terhadap peningkatan perekonomian menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 di Kabupaten Bantul?
2. Apa upaya dan hambatan birokrasi pemerintah daerah terhadap peningkatan perekonomian menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja birokrasi pemerintah daerah terhadap peningkatan perekonomian menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 di Kabupaten Bantul.

2. Untuk mengetahui upaya dan hambatan birokrasi pemerintah daerah terhadap peningkatan perekonomian menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis: menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN)
2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam realita yang terjadi berkaitan dengan kinerja birokrasi pemerintah daerah terhadap peningkatan perekonomian menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 di Kabupaten Bantul.